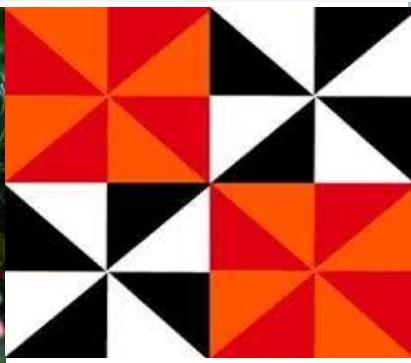




**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2021**

**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN  
TENAGA KERJA  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
JULI TAHUN 2022**



## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) merupakan dokumen rencana daerah yang mana terdapat penyesuaian – penyesuaian dengan keadaan yang dibutuhkan pada tahun berjalan sehingga berperan vital dalam mengarahkan program kegiatan serta subkegiatan pelayanan Perangkat Daerah satu tahun kedepan. Renja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah. Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat rencana pelayanan baik kepada masyarakat maupun pada sesama Perangkat Daerah lainnya yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan adanya perubahan terhadap agenda pembangunan yang lebih mengedepankan pada pencapaian kesejahteraan dan pemerintahan yang berdayasaing, maka untuk menghadapi tantangan dan perubahan di tahun 2021, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan strategi sebagai upaya pencapaian sasaran telah merumuskan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2021 kedalam 8 Program dengan sumberdana berasal dari APBD Kabupaten Lampung Barat.

Melalui Penyusunan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini diharapkan sasaran Perangkat Daerah akan tercapai.

Liwa , Juli 2021

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL,PTSP DAN TENAGA KERJA,



EDI YUSUF, S.Sos,M.H

Nip. 19631027 198603 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II .....	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	12
BAB IV PENUTUP .....	14

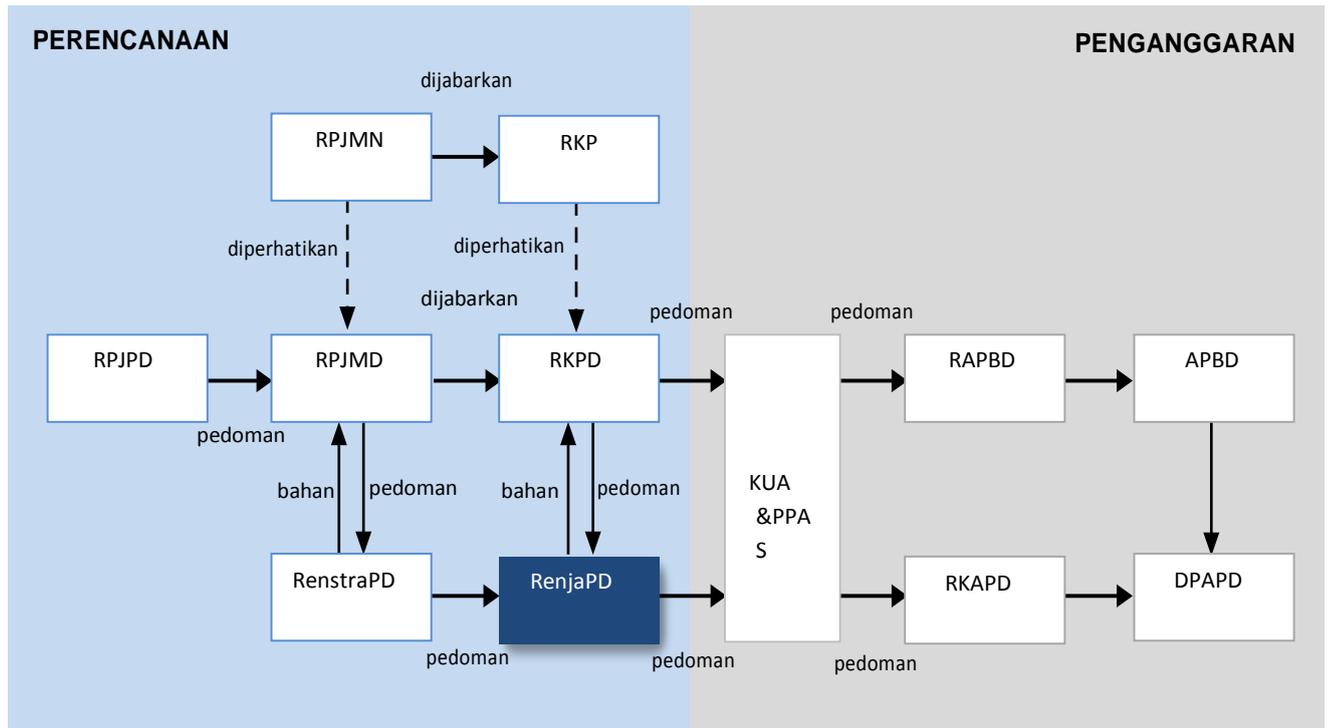
# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerjase bagi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat(11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ininantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



**Gambar1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD**

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja** Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja **Tahun 2021**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 yang disebabkan oleh: (1) Adanya kondisi luar biasa yaitu Pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2021; Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja** Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat **Tahun 2021**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dilandasi oleh beberapa aturan hukum yang mengatur keberadaan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
  8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
  9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang pedoman nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
  14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Perizinan di Bidang Penanaman Modal;
  15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
  16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 tahun 2010;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2018 Tentang RPJMD 2017 – 2022;
  20. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat di Tahun 2021, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat secara berkesinambungan.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan aktifitas di Kabupaten Lampung Barat, sehingga terwujud sinergitas antar pelaku dan kegiatan pembangunan khususnya pembangunan di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.

### **1.4 Dasar Pertimbangan**

Dasar pertimbangan perlu dibuatnya Renja Perubahan adalah sebagai berikut.

1. Untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah;
2. Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan sehingga terjadi pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran;

## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Renj Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun2021, meliputi :

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Memuat / menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan.

### 2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPDSAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

### 3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

### 4. BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

### 5. LAMPIRAN

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021**

Proses penyusunan suatu perencanaan erat hubungannya dengan proses evaluasi dari kegiatan tahun sebelumnya. Evaluasi dapat mengidentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi itu sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan untuk tahun-tahun mendatang.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan triwulan II.
- Memperhatikan pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat memiliki sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat dengan indicator Jumlah Investasi PMDN/PMA Rp. 90 Milyar
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu B
3. Meningkatnya Kesempatan Kerja dengan indicator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) : 80,89 %

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2021 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 8 ( Delapan ) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 13 ( TigaBelas ) kegiatan serta 34 sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2021 untuk Belanja sebesar Rp. 5.624.825.900,- setelah refocusing Rp. 5.064.426.900,- terealisasi sebesar Rp. 1.831.673.566,- atau 36 persen.

Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak 24 ( Dua Puluh Empat ) subkegiatan realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen pada triwulan II yaitu :

1. Subkegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi realisasi fisik / output sebesar 10 Orang dari target 35 orang yang dilatih (28,57% )Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
2. Subkegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota realisasi fisik / output sebesar 2 Jenis dari target 4 Jenis (50%) Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
3. Subkegiatan Pelayanan dan Penyediaan informasi Pasar Kerja Online realisasi fisik / output sebesar 18 Lowongan Perkerjaan dari target 36 Lowongan Pekerjaan (50%) Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas.
4. Subkegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) ralisasi fisik / output sebesar 0 (0%) dari target 30 Rekom IDCMI Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena *adanya pandemi covid-19 mengakibatkan Negara penerimaan Tenaga Migran Indonesia menutup akses Calon Tenaga Kerja dari Indonesia.*
5. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi fisik / output sebesar 2 Dokumen dari target 4 Dokumen (50%) persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
6. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD realisasi fisik / output sebesar 0 Dokumen ( 50 persen) dari target 2 Dokumen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
7. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD realisasi fisik / output sebesar 1 Dokumen dari target 2 Dokumen( 50 persen) Realisasi

- fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
8. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi fisik / output sebesar 50 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
  9. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi fisik / output sebesar 50 persen Realisasifisik / output tidakmencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
  10. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi fisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas (Laporan disusun diakhir tahun);
  11. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan realisasi fisik / output sebesar 50 persen Realisasifisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
  12. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasifisik / output sebesar 50 persen Realisasifisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
  13. Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD realisasifisik / output sebesar 50 persen Realisasifisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
  14. Subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat realisasi fisik / output sebesar 915 Surat (89%) Realisasifisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
  15. Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan realisasi fisik / output sebesar 45,5 persen Realisasifisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
  16. Subkegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya realisasi fisik / output sebesar 66,67 persen Realisasifisik / output tidak mencapai 100 persen karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas
  17. Subkegiatan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten / kota realisasi fisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena adanya *pandemi covid 19 serta pemberlakuan PPKM darurat di pulau jawa dan Bali*
  18. Subkegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik realisasi fisik / output sebesar 310 Izin (77,50 persen) dari target sebesar 400 Izin.

19. Subkegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal realisasi fisik / output sebesar 29 Survei Perizinan (56,86 persen) dari target 51 Survei Perizinan Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan anggaran kas.
20. Subkegiatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu, perizinan dan nonperizinan realisasi fisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen.
21. Subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal realisasi fisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena pelaksanaan sesuai dengan anggaran kas.
22. Subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal realisasi fisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena pelaksanaan sesuai dengan anggaran kas.
23. Subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal realisasi fisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena pelaksanaan sesuai dengan anggaran kas.
24. Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik realisasi fisik / output sebesar 0 persen Realisasi fisik / output tidak mencapai 100 persen, karena pelaksanaan sesuai dengan anggaran kas

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program , Kegiatan dan Subkegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 yang dituangkan dalam Bab III ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan OPD yang menanganinya.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini adalah bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD Pergeseran / Perubahan Kabupaten Lampung Barat tahun 2021.

Adapun rincian Rencana Program , Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran belanja pada RKPD/Renja Murni tahun 2021 sebesar Rp. 8.429.369.959,-
2. Jumlah anggaran Belanja pada APBD Murni Tahun 2021 sebesar Rp. 5.624.825.900,-
3. Jumlah anggaran yang bertambah akibat akibat refocusing tahun 2021 sebesar Rp. –
4. Jumlah anggaran yang berkurang akibat refocusing tahun 2021 sebesar Rp. 560.399.000,-
5. Jumlah subkegiatan yang ditunda pelaksanaannya akibat refocusing tahun 2021 sebanyak 1 (satu) subkegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6. Jumlah subkegiatan yang baru muncul akibat refocusing tahun 2021 sebanyak 0 subkegiatan

7. Jumlah subkegiatan yang direncanakan ditunda pelaksanaannya pada Perubahan APBD tahun 2021 sebanyak 0 subkegiatan
8. Jumlah subkegiatan yang baru muncul pada perubahan APBD tahun 2021 sebanyak 0 kegiatan

## BAB IV

### P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat 2017–2022 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2021.

Demikian perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung tahun 2021 untuk dipedomani pada tataran implementasi, keberhasilan pelaksanaan renja OPD Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat akan terlaksana semaksimal mungkin apabila semua aparatur berpartisipasi aktif sesuai dengan komitmen bersama, mantapnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.

Liwa , Juli 2021  
KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA,



EDI YUSUF, S.Sos., MH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19631027 198603 1 009

# **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**LAMPIRAN I**  
**EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**  
Kabupaten Lampung Barat

**DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2018 ditambah Tahun 2019 ditambah Tahun 2020	Target Kinerja Renja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d Triwulan II Tahun 2021		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2021	
									Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9=5+7	10=9/4
2	7	3		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Lulusan Pelatihan yang bekerja	75%	60%	70%	60%	85.71%	60	86%
2	7	3	2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Pelatihan yang dilaksanakan	5 Jenis	4	4 Jenis	2 Jenis	50.00%	4	80%
2	7	3	2.01	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan	340 Orang	215 Orang	35 orang	10 Orang	28.57%	250	74%
2	7	3	2.01	3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pelaksanaan Operasional Kantor BLK  Jumlah Sarana Pelatihan Kerja yang Tersedia	60 Bulan  5 Jenis	36 Bulan  -	-  4 Jenis	2 Jenis	50.00%	36  2	60%  40%
2	7	4		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Mendapatkan Pekerjaan	40%	26%	35%	10%	28.57%		65%
		4	2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Jumlah media penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	4 Media	4 Media	4 Media	4 Media	100.00%	4	100%
		4	2.03	2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	108 Lowongan Pekerjaan	36 Lowongan Perkerjaan	36 Lowongan Pekerjaan	18 Lowongan Pekerjaa	50.00%	54	75%
2	7	4	2.04	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pekerja Migran Indonesia asal Lampung Barat yang mendapatkan pelayanan  Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi	120 Rekom IDCMI  5 Kali	14	30 Rekom IDCMI  -	-  -	0.00%  0.00%	44  -	37%  0%
2	7	4	2.04	1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	jumlah rekom ID CMI yang terbit	120 Rekom IDCMI	14 Rekom ID CMI	30 Rekom IDCMI	-	0.00%	44	37%
2	7	5		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Jumlah perselisihan hubungan industrial  Persentase Perusahaan yang menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3)	1 Kasus  41%	-  18%	41%  -	-  -	-  -	18%	44%

2	7	5	2.02		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan, kesehatan kerja	<b>15 Perusahaan</b>	-	15 Perusahaan	-	-	-	-
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan	5 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	3	60%
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengusulan Penetapan UMK	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1	100.00%	4	80%
2	18	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan	<b>2 Bidang Urusan</b>	-	2 Bidang Urusan	2 Bidang Urusan	<b>100.00%</b>	2	100%
2	18	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	<b>110 Dokumen</b>	66 Dokumen	22 Dokumen	10 Dokumen	<b>45.45%</b>	77	77%
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	20 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50.00%	8	50%
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	1	50.00%	8	80%
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	10 Dokumen	6 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	50.00%	8	80%
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50.00%	14	70%
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	50 Dokumen	30 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	50.00%	35	70%
2	18	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang</b>	<b>15 Dokumen</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>2 Dokumeaan</b>	<b>100.00%</b>	<b>11</b>	<b>73%</b>
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan Tunjangannya	28 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	100.00%	26	93%
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	0.00%	3	60%
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	4	80%
2	18	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	4	80%
2	18	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian	<b>4 Sub Organisasi</b>	4 Sub Organisasi		4 Sub Organisasi		4	100%
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yg disediakan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100.00%	10	100%

2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan jenis penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	4 Jenis	50.00%	8	100%
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU (Surat Kabar Harian Umum)	5 SKHU	5 SKHU	5 SKHU	5 SKHU	100.00%	5	100%
2	18	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	60 Kali	36 Kali	12 Kali	6 Bulan	50.00%	42	70%
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	90 Kali	54 Kali	12 Kali	6 Kali	50.00%	60	67%
2	18	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>4 Sub Bagian</b>	4 Sub Bagian	4 Sub Bagian	4 Sub Bagian	<b>100.00%</b>	4	100%
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	5635 Surat	4257 Surat	1027 Surat	915 Surat	89.09%	5172	92%
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening/ID Pelanggan	5 Rekening	5 Rekening	4 Rekening	4 Rekening	100.00%	5	100%
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantornya	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	4 Jenis	100.00%	4	100%
2	18	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	<b>3 Jenis</b>	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	<b>100.00%</b>	3	100%
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kenaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak kendaraanya	15 Kendaraan	11 Kendaraan	11 Kendaraan	5 Kendaraan	45.45%	5	33%
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaannya	15 Kendaraan	11 Kendaraan	11 Kendaraan	11 Kendaraan	100.00%	11	73%
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	9 Unit	6 Unit	66.67%	9	67%
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	100.00%	2	100%
2	18	3			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah unit usaha baru	<b>50 Unit Usaha Baru</b>	-	50 Unit Usaha Baru	-	-	-	0%
2	18	3	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	<b>10 Event</b>	4 Event	2 Event	-	-	4	40%
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen	-	-	-	-	-	0%
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	10 Event	4 Event	2 Event	-	-	4	40%
2	18	4			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar	<b>90%</b>	85%	85%		<b>85.00%</b>	85	85%

2	18	4	2.01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang terbit	<b>800 Izin</b>	302 Izin	400 Izin	310 Izin	<b>77.50%</b>	612	77%
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemohon perizinan yang dilayani	800 Orang	302 Orang	400 Izin	310 Izin	77.50%	612	77%
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah survei perizinan	264 Survei Perizinan	143 Survei Perizinan	51 Izin	29 Izin	56.86%	172	65%
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Jumlah Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Jumlah Laporan yang ditindak lanjuti	1 Dokumen 4 Jenis 4 Laporan	4 Jenis	2 4 Laporan	-	0.00%	4	100%
2	18	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan	<b>75%</b>	-	75%	-	-	-	0%
2	18	5	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Penanaman Modal	<b>9 Pelaku Usaha</b>	-	9 Pelaku Usaha	-	-	-	0%
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Penanaman Modal	12 Dokumen	-	9 Profil Usaha	-	-	-	0%
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembinaan (Bimtek) Penanaman Modal Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembinaan (Sosialisasi) Penanaman Modal	360 Orang 180 Orang	-	234 Orang	-	-	-	0%
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal	40 Dokumen	-	16 Laporan	-	-	-	0%
2	18	6			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Penanaman Modal di Kab. Lampung Barat	<b>15 Sektor Usaha</b>	-	15 Sektor Usaha	-	-	-	0%
2	18	6	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Buku data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan	<b>5 Buku</b>	-	1 Buku	-	-	-	0%
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Buku Data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan	48 Eksemplar	-	45 Eksemplar	-	-	-	0%
											<b>65.15%</b>		<b>61%</b>

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja												0%	-					
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.15.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja												0%	-					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										0%	-					
2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			460,996,900	460,996,900						0%	507,096,590					
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang bekerja	70.00%	70.00%	331,567,900	331,567,900				70%	364,724,690					
2	7	3	2.01	Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	5 Jenis	5 Jenis	331,567,900	331,567,900			5 Jenis	364,724,690					
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan	35 Orang	35 Orang	295,367,800	295,367,800	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Wates	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Masyarakat	35 Orang	324,904,580	
												0%	-					
2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pelatihan Kerja yang tersedia	5 Jenis	4 Jenis	36,200,100	36,200,100	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Wates	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Masyarakat/Peserta Pelatihan	4 Jenis	39,820,110	
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Mendapatkan Pekerjaan	35.00%	35.00%	76,560,000	76,560,000				35%	84,216,000			
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah media penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	4 Jenis	4 Jenis	43,774,000	43,774,000				4 Jenis	48,151,400			
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah penyebarluasan informasi bursa tenagakerja	36 kali	36 kali	43,774,000	43,774,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Masyarakat/Pencari Kerja	36 kali	48,151,400	
												0%	-					
2	7	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Migran Indonesia asal Lampung Barat yang mendapatkan pelayanan	30 Orang	30 Orang	32,786,000	32,786,000				30 Orang	36,064,600			
2	7	4	2.04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah rekom ID CMI yang terbit	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	32,786,000	32,786,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Wates	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Calon Pekerja Migran Indonesia	30 Rekomendasi	36,064,600	
												0%	-					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	7	5															
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah perselisihan hubungan industrial	2 Kasus	2 Kasus	52,869,000	52,869,000									
2	7	5	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monev Perusahaan yang Beroperasi di Lampung Barat	15 Perusahaan	15 Perusahaan	52,869,000	52,869,000								
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan UMK	1 Dokumen	1 Dokumen	52,869,000	52,869,000							
2	18																
2	18																
2	18	1															
2	18	1	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	22 Dokumen	22 Dokumen	19,008,100	21,708,100							
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	2,529,100	3,429,100	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	4 Dokumen	3,772,010
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA & RKA-P	2 Dokumen	2 Dokumen	1,561,000	2,461,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	2 Dokumen	2,707,100
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA & DPA P	2 Dokumen	2 Dokumen	1,561,000	2,461,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	2 Dokumen	2,707,100
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	2,161,000	2,161,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	4 Dokumen	2,377,100
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	11,196,000	11,196,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	10 Dokumen	12,315,600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	18	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	3 Dokumen	Dokumen	2,502,204,100	2,638,550,365						Dokumen	2,902,405,402		
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan Tunjangannya	26 Orang	26 Orang	2,496,704,100	2,633,050,365	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	26 Orang	2,896,355,402	
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	1 Dokumen	2,750,000	
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	1 Dokumen	1,100,000	
2	18	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	2,000,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	1 Dokumen	2,200,000	
2	18	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang dilaksanakan pengadministrasian umumnya	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	109,623,800	110,673,800							4 Sub Organisasi	121,741,180	
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik	10 Jenis	10 Jenis	2,548,800	4,108,800	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	10 Jenis	4,519,680	
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak	6 Jenis	6 Jenis	19,775,000	20,825,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	6 Jenis	22,907,500	
					Jumlah Jenis Penggandaan	1 Jenis	1 Jenis									1 Jenis	-	
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU)	5 SKHU	5 SKHU	4,860,000	4,860,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	5 SKHU	5,346,000	
2	18	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Kali	12 Kali	5,510,000	6,016,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	12 Kali	6,617,600	
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	2 Jenis	2 Jenis	76,930,000	74,864,000	Kabupaten Lampung Barat dan Luar Kabupaten Lampung Barat	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	2 Jenis	82,350,400	
2	18	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Organisasi yang disediakan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	181,129,600	177,379,600							4 Sub Organisasi	195,117,560	
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	1127 Surat	1127 Surat	4,350,000	600,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	1127 Surat	660,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening/ID Pelanggan	4 Rekening	4 Rekening	18,740,000	18,740,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	4 Rekening	20,614,000	
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	158,039,600	158,039,600	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	4 Jenis	173,843,560	
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	125,423,600	125,423,600						3 Jenis	137,965,960	
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang disediakan Pajak Kendaraannya	11 Kendaraan	11 Kendaraan	4,750,000	4,750,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	11 Kendaraan	5,225,000	
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaannya	11 Kendaraan	11 Kendaraan	99,590,000	99,590,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	11 Kendaraan	109,549,000	
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	8 Unit	12,044,000	12,044,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	8 Unit	13,248,400	
2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	9,039,600	9,039,600	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	2 Gedung	9,943,560	
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah unit usaha baru	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	1,543,227,900	982,828,900						50 Unit Usaha	1,081,111,790	
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	2 Event	2 Event	1,543,227,900	982,828,900						2 Event	1,081,111,790	
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	2 Event	2 Event	1,543,227,900	982,828,900	Luar Kabupaten Lampung Barat	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Masyarakat/Calon Investor	2 Event	1,081,111,790	
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	85.00%	85.00%	323,089,900	323,089,900						85%	355,398,890	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	18	4	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang terbit	400 Izin	400 Izin	323,089,900	323,089,900					400 Izin	355,398,890		
2	18	4	2.01	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang terbit	400 Izin	400 Izin	224,025,900	224,025,900	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Masyarakat	400 Izin	246,428,490	
2	18	4	2.01	2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Survei Perizinan	51 Survei Perizinan	51 Survei Perizinan	69,339,000	69,339,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Masyarakat	51 Survei Perizinan	76,272,900	
2	18	4	2.01	3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan tindaklanjut	4 Laporan	4 Laporan	29,725,000	29,725,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Masyarakat	4 Laporan	32,697,500	
2	18	5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan	75.00%	75.00%	326,122,000	326,122,000					75%	358,734,200		
2	18	5	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang melakukan pelaporan penanaman modal	9 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	326,122,000	326,122,000					9 Pelaku Usaha	358,734,200		
2	18	5	2.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemantauan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Penanaman Modal	10 Profil	10 Profil	48,300,000	48,300,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Masyarakat	10 Profil	53,130,000	
2	18	5	2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal	234 Orang	234 Orang	181,222,000	181,222,000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Masyarakat	234 Orang	199,344,200	
2	18	5	2.01	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal	20 Kali	20 Kali	96,600,000	96,600,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Masyarakat	20 Kali	106,260,000	
2	18	6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanaman Modal di Kab. Lampung Barat	15 Sektor Usaha	15 Sektor Usaha	34,000,000	34,000,000					15 Sektor Usaha	37,400,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (Renja Perubahan)			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	18	6	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Investasi dan Realisasi Perizinan Berusaha	1 Dokumen	1 Dokumen	34,000,000	34,000,000						1 Dokumen	37,400,000		
2	18	6	2.01	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Buku data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan	45 Eksemplar	45 Eksemplar	34,000,000	34,000,000	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Investor dan Calon Investor	45 Eksemplar	37,400,000		
<b>TOTAL</b>								<b>5.624.825.900</b>	<b>5.200.773.165</b>						0%	<b>5.720.850.482</b>		